

# STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DI INDONESIA

## *Strategies for Optimizing Balanced Fund Management in Indonesia*

Ahmad Nurkhayat<sup>1</sup>, Muhammad Firdaus<sup>2</sup>, Sri Mulatsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staff Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Email: enka.ahmad@gmail.com

<sup>2</sup>Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email: firdausfemipb@yahoo.com, mulatsupardi@gmail.com

### ABSTRACT

*Balanced Fund is a part of the fund transfers by the central government to the regional government in implementing fiscal decentralization. The aims of this policy are to: (1) reduce the inequality of funding sources between central and regional governments (vertical imbalance), and the inter-regional imbalance (horizontal imbalance), (2) reduce public service gap among regions. The objectives of this study are to (1) describe the implementation of Balanced Fund in Indonesia, (2) analyze the effects of Balanced Fund on economic growth, (3) formulate optimization strategy of Balanced Fund management in Indonesia. This study used descriptive analysis, panel data regression analysis, and SWOT analysis. Descriptive analysis indicates that Balanced Fund has not been able to optimize equitable regional distribution of financial capability, particularly for regencies and cities. Panel data regression analysis shows that General Allocation Fund and Special Allocation Fund have positive effects on economic growth, except in Banten in which Special Allocation Fund has no effects. Meanwhile, Revenue Sharing Fund results in negative effects on economic growth, except in East Java in which it has no effects. SWOT analysis formulates eight alternative strategies which may be implemented by the Central Government in optimizing the Balanced Fund management.*

*Keywords: General Allocation Fund, panel data, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, SWOT*

### ABSTRAK

Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana ini bertujuan: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), dan (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis SWOT. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan DBH berpengaruh negatif. Hasil analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, data panel, Dana Revenue Sharing, Dana Alokasi Khusus, SWOT

### PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Implementasi kebijakan tersebut memiliki tiga misi utama, yaitu: (1) meningkatkan

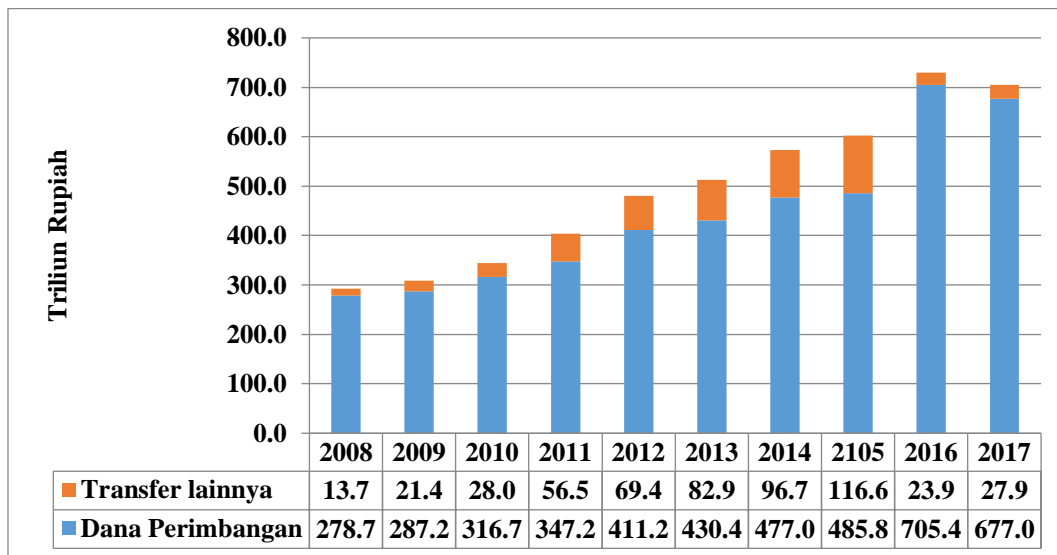
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo 2002). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan pelaksanaan otonomi

diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun Dana Perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Tiebout (1956) menyatakan bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan berkompetisi untuk menyediakan layanan publik bagi daerahnya.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kewenangan daerah untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Namun di sisi lain, potensi sumber daya alam dan sumber penerimaan pajak yang dimiliki oleh setiap daerah sangat beragam. Beberapa daerah memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber pajak yang besar, sementara sebagian besar daerah yang lain justru masih kesulitan untuk menggali sumber

penerimaan karena terbatasnya sumber daya alam maupun sumber pajak yang dimiliki. Dalam upaya mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah tersebut maka pemerintah mengalokasikan Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah.

Anggaran transfer ke daerah semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pelayanan publik di daerah. Kondisi ini tentunya akan semakin mempersempit ruang fiskal (*fiscal space*) dalam APBN mengingat kemampuan keuangan negara yang terbatas. Anggaran dana transfer ke daerah pada dasarnya terdiri atas Dana Perimbangan dan dana transfer yang lainnya yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah (DID).



Sumber: diolah dari LKPP (2009-2016) dan UU APBN (2016-2017)

Gambar 1 Alokasi komponen transfer ke daerah tahun 2008-2017

Gambar 1 menunjukkan bahwa alokasi transfer ke daerah sebagian besar dialokasikan untuk anggaran Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 dari total

transfer ke daerah sebesar Rp 292,4 triliun, sekitar 95 persen anggarannya dialokasikan untuk Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp278,7 triliun. Sisanya

sebesar Rp 13,4 triliun dialokasikan untuk jenis transfer yang lain. Alokasi Dana perimbangan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 677 triliun atau 96 persen dari total transfer ke daerah.

Peningkatan alokasi Dana Perimbangan di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk mampu melakukan pengelolaan anggaran Dana Perimbangan tersebut secara optimal. Namun demikian, implementasi Dana Perimbangan masih mengalami beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Word Bank (2010) mengungkapkan bahwa alokasi transfer ke daerah belum mendukung pemerataan antar daerah, sekaligus masih terjadi ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DJPK (2012) juga menyampaikan bahwa secara nasional DAU masih belum bisa optimal memenuhi kebutuhan pendanaan daerah, utamanya bagi daerah kabupaten dan kota. Terkait dengan pengelolaan DAK, diketahui bahwa penyerapan DAK tahun 2011 dan 2012 di beberapa daerah masih relatif rendah. Sementara itu bagi daerah yang memiliki penyerapan DAK dan komponen Dana Perimbangan lainnya yang relatif tinggi juga tidak secara otomatis menunjukkan efisiensi pengelolaan Dana Perimbangan di wilayah tersebut (DJPK 2013).

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, 2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan instansi-instansi tersebut merupakan instansi yang terlibat dalam pengelolaan Dana Perimbangan di tingkat Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2017.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari DJPK, DJA, dan Badan Pusat Statistik. Data primer diperoleh melalui kuesioner sekaligus wawancara kepada 5 (lima) orang responden yaitu dari DJPK sebanyak 3 (tiga) orang, DJA sebanyak 1 (satu) orang, dan Bappenas sebanyak 1 (satu) orang.

### Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) analisis deskriptif, 2) analisis regresi data panel, dan 3) analisis SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2010).

Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*, yang diperoleh melalui hasil observasi terhadap sekumpulan obyek pada sepanjang kurun waktu tertentu (Firdaus 2011). Variabel dependen yang digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Sementara itu variabel independen terdiri dari komponen Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) ditambah dengan penerimaan PAD. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$\text{LnPDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDAU}_{it} + \beta_2 \text{LnDBH}_{it} + \beta_3 \text{LnDAK}_{it} + \beta_4 \text{LnPAD}_{it} + \varepsilon$$

Dimana

- PDRB : Realisasi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (miliar rupiah)
- DAU : Realisasi Dana Alokasi Umum (miliar rupiah)
- DBH : Realisasi Dana Bagi Hasil (miliar rupiah)
- DAK : Realisasi Dana Alokasi Khusus (miliar rupiah)
- PAD : Realisasi Penadapatan Asli

- Daerah (miliar rupiah)
- i : Provinsi
- t : Tahun 2011 - 2015
- Ln : Logaritma Natural
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_{1-4}$  : Koefisien regresi
- $\varepsilon$  : Error

Selanjutnya, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Dana Perimbangan di Indonesia

Tabel 1 Perkembangan pagu dan realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008-2015 (triliun rupiah)

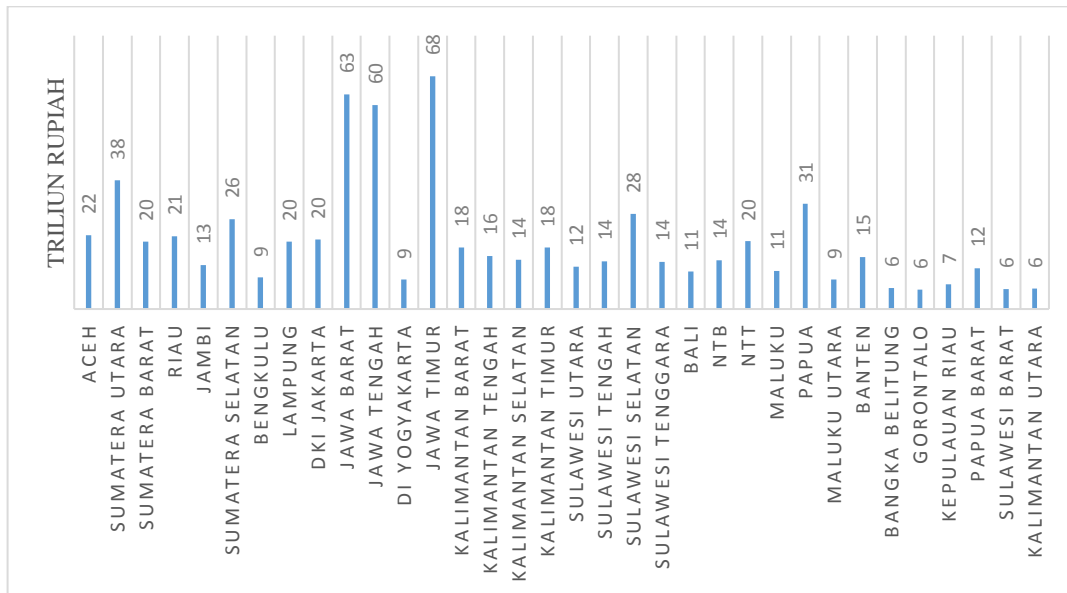
Uraian	2008			2011			2015		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
DAU	179,5	179,5	100	225,5	225,5	100	352,9	352,9	100
DBH	77,7	78,4	100,9	96,7	96,9	100,2	110,1	78,1	70,9
DAK	21,2	20,8	98,0	25,2	24,8	98,3	58,8	54,9	93,3
Total	278,4	278,7	100,1	347,5	347,2	99,9	521,8	485,8	93,1

Sumber: diolah dari DJPK

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 alokasi Dana Perimbangan telah mengalami kenaikan signifikan. Realisasi anggaran mengalami peningkatan dari Rp 278,4 triliun menjadi Rp 485,8 triliun atau meningkat sekitar 75 persen. DAK memiliki realisasi yang lebih rendah di banding komponen Dana Perimbangan lainnya, kecuali pada tahun 2015 dimana realisasi terendah adalah DBH. Salah satu penyebab realisasi DAK yang lebih rendah

tersebut adalah adanya daerah yang tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK sehingga daerah tersebut tidak mendapatkan penyaluran DAK tahap berikutnya (DJPK 2014).

Pada tahun 2017 pagu alokasi Dana Perimbangan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 677,1 triliun. Alokasi tersebut didistribusikan kepada provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan rincian total per provinsi sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2 Alokasi Dana Perimbangan kabupaten dan kota per provinsi tahun 2017

Gambar 2 menunjukkan bahwa provinsi yang memperoleh alokasi Dana Perimbangan paling besar adalah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 68 triliun, alokasi terbesar kedua dan ketiga adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Semakin besar alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh masing-masing daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah. DJPK (2012) menyebutkan bahwa pada tahun 2012, dari 32 provinsi penerima DAU sebanyak 15 provinsi atau hampir 50 persen pada prinsipnya mampu kebutuhan fiskalnya tanpa alokasi DAU. Hal ini terjadi karena kapasitas fiskal daerah tersebut lebih tinggi di banding dengan kebutuhan fiskalnya. Selanjutnya setelah DAU dialokasikan, jumlah DAU yang mampu memenuhi kebutuhan fiskal daerah mencapai kisaran 70 persen sedangkan 30 persen daerah masih tetap belum mampu memenuhi kebutuhannya. Kondisi yang lain terjadi pada tingkat kabupaten dan kota dimana hanya sekitar 6 persen daerah yang mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa alokasi DAU. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya alokasi DAU untuk provinsi lebih besar dari yang dibutuhkan. Distribusi DAU juga belum optimal dimana daerah yang sebenarnya

cukup mampu memenuhi kebutuhan pendanaannya ternyata masih mendapat alokasi DAU, sementara daerah yang masih memerlukan DAU untuk memenuhi kebutuhan fiskal justru mendapat alokasi kurang dari yang dibutuhkan. Berkebalikan dengan kondisi provinsi, maka untuk kabupaten/kota justru terjadi kekurangan pendanaan yang cukup signifikan.

Dana Perimbangan memiliki peran yang sangat penting bagi sebagian besar daerah. Dana tersebut diharapkan mampu dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat melalui alokasi belanja modal. Tuasikal (2008) mengungkapkan bahwa pada periode tahun 2005, DAU dan DAK memiliki kontribusi positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, pembangunan infrastruktur diketahui memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian Indonesia (Prasetyo dan Firdaus 2009). Namun demikian, secara nasional Dana Perimbangan khususnya DAU masih belum bisa optimal memenuhi kebutuhan pendanaan daerah utamanya bagi daerah kabupaten dan kota. DJPK (2012) menyatakan bahwa pada tahun 2012 distribusi DAU belum optimal. Daerah yang sebenarnya cukup mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya ternyata masih

mendapat alokasi DAU, sementara daerah yang masih memerlukan DAU justru mendapat alokasi kurang dari yang dibutuhkan. Kondisi yang lain terjadi pada tingkat kabupaten dan kota dimana hanya sekitar 6 persen daerah yang mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa alokasi DAU.

**Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi maka dilakukan analisis regresi dengan menggunakan data panel. Data *cross section* menggunakan data seluruh kabupaten dan kota yang diagregasi dalam lingkup propinsi sebanyak 31 provinsi, tidak termasuk provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. DKI Jakarta dikeluarkan dalam analisis karena provinsi tersebut tidak mendapatkan alokasi DAU maupun DAK. Sementara untuk Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan baru mendapatkan alokasi Dana Perimbangan mulai tahun 2013, sehingga kedua provinsi tersebut dikeluarkan dari analisis.

Penentuan pendekatan terbaik antara *fixed effects* dan *random effects* yang akan digunakan dalam pengolahan data panel dilakukan menggunakan *Hausman Test*. Hasil *Hausman Test* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 sehingga pendekatan yang digunakan adalah *fixed effects*. Model yang digunakan juga telah memenuhi uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Variabel	Koefisien
DAU	0,254424***
DBH	-0,016050***
DAK	0,059446***

\*\*\* nyata pada  $\alpha = 1$  persen

Tabel 2 menunjukkan pengaruh DAU, DBH, dan DAK sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh positif terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia. Nilai koefisien sebesar 0,254424 menunjukkan bahwa jika DAU naik 1 persen maka rata-rata PDRB akan meningkat sebesar 0,254424 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Maryati dan Endrawati (2010) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh DAU yang bernilai positif terhadap PDRB dapat terjadi jika alokasi DAU yang diterima oleh daerah tidak hanya dialokasikan untuk belanja operasional daerah tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. DBH berpengaruh negatif terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar -0,016050. Hal ini menunjukkan bahwa jika DBH naik 1 persen maka rata-rata PDRB akan menurun sebesar 0,016050 persen

Pengaruh negatif DBH terhadap PDRB ini sesuai dengan hasil penelitian Husna dan Sofia (2013). Pengaruh negatif DBH terhadap PDRB dimungkinkan jika tambahan alokasi DBH didapatkan melalui proses penarikan pajak yang terlalu tinggi yang dapat menghambat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Barro (1990) bahwa peningkatan tingkat pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah tidak berdampak langsung terhadap produktifitas sektor swasta, tetapi mendorong peningkatan pajak. Kondisi ini akan memberikan disinsentif terhadap investasi yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. DAK menunjukkan pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0,059446. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika DAK naik 1 persen maka rata-rata PDRB akan meningkat sebesar 0,059446 persen.

Pengaruh positif DAK terhadap PDRB ini berbeda dengan penelitian Husna dan Sofia (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh DAK yang bernilai positif terhadap PDRB dapat terjadi jika alokasi DAK benar-benar dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan prioritas nasional

Dana Perimbangan pada prinsipnya merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal. Beberapa kajian mengungkapkan hasil yang berbeda terkait hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Iimi (2005) dan Zhang and Zou (1998) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu kajian lain menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Xie *et al.* 1999; Martinez-Vazquez and McNab 2003; Im 2010).

### Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan

Alternatif strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan dalam rangka merumuskan strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam upaya pengelolaan Dana Perimbangan secara optimal.

Berdasarkan kajian literatur, penilaian melalui kuesioner dan hasil wawancara dengan *stakeholder* sebagai responden penelitian, diperoleh faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Perimbangan pada pemerintah pusat sebagaimana Tabel 3.

Berdasarkan matriks SWOT pada Tabel 3 dapat dirumuskan delapan alternatif strategi sesuai dengan tingkat prioritasnya. Strategi-strategi ini sejalan dengan rencana kerja DJPK serta kebijakan pengelolaan Dana Perimbangan.

1. Peningkatan kualitas Dana Perimbangan  
Dalam rangka menciptakan *vertical imbalance* dan *horizontal imbalance* maka diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan. Strategi ini dilakukan antara lain melalui program:

a. Penyempurnaan formula DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal

Dalam upaya mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pemerintah perlu merumuskan kembali formula atau persentase perhitungan DBH. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama bagi daerah penghasil DBH.

b. Penyempurnaan formula DAU untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah maka perlu merumuskan kembali formula perhitungan alokasi DAU. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui penyempurnaan formulasi bobot Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

c. Penyempurnaan formula DAK untuk mendorong pencapaian pelayanan dasar di daerah.

Alokasi DAK agar lebih diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal dalam hal pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tabel 3 Matriks SWOT

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
IFAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas</li> <li>2. Komitmen dan tanggung jawab pemerintah pusat</li> <li>3. Peraturan perundangan yang memadai dan mendukung pengelolaan Dana Perimbangan secara efektif</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan</li> <li>5. Pembinaan dan pengembangan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di tingkat Pemerintah Pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dan sinergi antar instansi pusat belum optimal</li> <li>2. Sistem informasi dan teknologi belum optimal</li> <li>3. Standart Operasional Prosedur (SOP) kurang memadai</li> <li>4. Kemampuan keuangan negara yang terbatas</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi kurang optimal</li> </ol>
EFAS		
<b>Peluang (O)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen, tanggung jawab dan kepatuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pengelolaan Dana Perimbangan</li> <li>2. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota</li> <li>3. Peraturan pelaksanaan yang mendukung Pengelolaan Dana Perimbangan di daerah</li> <li>4. Mekanisme <i>reward and punishment</i> yang efektif dalam pengelolaan dana perimbangan di daerah</li> <li>5. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengelola Dana Perimbangan di daerah</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Dana Perimbangan (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4)</li> <li>2. Penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (S3, O3)</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah pusat, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (W1, O2)</li> <li>2. Peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah (W4, O1, O2)</li> </ol>
<b>Ancaman (T)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem informasi dan teknologi di daerah kurang optimal</li> <li>2. Pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme dan pengelolaan Dana Perimbangan masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas</li> <li>4. Pemanfaatkan Dana Perimbangan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang belum optimal</li> <li>5. Adanya penambahan jumlah kabupaten/kota akibat pemekaran daerah baru</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah (S1, S5, T2)</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah (W4, T3, T4)</li> <li>2. Implementasi integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat (W2, T1)</li> <li>3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan (W5, T4)</li> </ol>





- Penyempurnaan formula Dana Perimbangan merupakan salah satu program kerja yang tengah dilaksanakan oleh DJPK. Namun demikian, penyempurnaan formula DAU benar-benar harus diprioritaskan mengingat DAU merupakan komponen pembiayaan terbesar dari Dana Perimbangan sekaligus sumber penerimaan terbesar bagi sebagian besar daerah.
2. Penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
    - a. Pendampingan dari pemerintah pusat dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan oleh pemerintah daerah  
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Perimbangan adalah adanya peraturan pelaksanaan di daerah yang kurang sejalan dengan kebijakan atau peraturan di tingkat pusat. Oleh karena itu diperlukan adanya pendampingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan ataupun kebijakan pelaksanaan Dana Perimbangan di tingkat daerah.
    - b. Melakukan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004  
Kebijakan pengelolaan Dana Perimbangan saat ini telah mengalami perkembangan. Untuk itu dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan revisi UU No 33 Tahun 2004 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Dana Perimbangan. Penyusunan draft revisi undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian revisi undang-undang tersebut harus benar-benar mampu menciptakan hubungan keuangan yang lebih baik dan adil antara pusat dan daerah.
  3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah pusat, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  
Koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak terkait sangat penting dilakukan untuk merespon segala perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan koordinasi dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas implementasi dan permasalahan pengelolaan Dana Perimbangan. Program kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah membentuk forum komunikasi antar para perencana dan pengelola Dana Perimbangan baik pusat maupun daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergi antar *stakeholder*.
  4. Peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah.
    - a. Penetapan alokasi Dana Perimbangan secara tepat dan cermat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas fiskal daerah.  
Salah satu proses dalam penganggaran Dana Perimbangan adalah proses penetapan alokasi anggaran. Penetapan alokasi Dana Perimbangan harus dilakukan secara cermat agar mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya ini maka perlu ketersediaan database yang menjadi dasar perhitungan secara akurat.
    - b. Menyelaraskan rencana kegiatan Dana Perimbangan khususnya DAK dengan prioritas nasional.  
Dalam kerangka otonomi daerah maka kebijakan dan pembangunan di daerah pada dasarnya tetap harus diselaraskan dengan program kebijakan di tingkat pusat. Kegiatan

pembangunan khususnya yang bersumber dari anggaran DAK harus sejalan dengan prioritas nasional.

5. Peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Dana Perimbangan yang dilaksanakan pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik dari sisi kuantitas. Namun kegiatan tersebut belum mampu memberikan dampak secara optimal terhadap kemampuan para pengelola Dana Perimbangan. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola di daerah, kebijakan yang dilakukan adalah

- a. Peningkatkan kerjasama pelaksanaan pelatihan pengelolaan Dana Perimbangan melalui *cost sharing* APBN dan APBD.
- b. Mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM secara mandiri di daerah.

Kebijakan tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh daerah. Namun demi efektifitas pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM tersebut maka perlu disusun ketentuan dan instrumen pengawasan yang lebih tegas.

6. Peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah

Strategi ini dilakukan antara lain melalui:

- a. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Transfer Umum (DAU + DBH) minimal 25 persen untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik. Kebijakan ini sudah ditetapkan dalam UU APBN. Namun perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan kebijakan ini dengan baik.
- b. Sinkronisasi kegiatan DAK Fisik dengan belanja kementerian/lembaga dan pendanaan APBD.

Dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan dasar, maka harus ada sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan terutama DAK Fisik dengan kegiatan sumber pembiayaan lainnya.

7. Implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat  
Strategi ini dilakukan antara lain melalui:

- a. Pengintegrasian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dengan Informasi Keuangan Pusat (IKP) dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Kebijakan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian mengingat masih adanya kendala pemanfaatan sistem informasi teknologi di beberapa daerah maka perlu adanya upaya pengembangan dan updating sistem informasi secara kontinyu.
- b. Peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis kepada para aplikator atau pengelola data keuangan daerah. Salah satu hal penting dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi adalah ketersediaan SDM pengelola yang kompeten. Peningkatan kompetensi bagi SDM tersebut menjadi satu keharusan bagi terciptanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi.

8. Peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan

Strategi ini dilakukan antara lain melalui:

- a. Penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Dalam upaya merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Perimbangan yang lebih baik maka diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Monitoring dan evaluasi harus mampu menghasilkan informasi secara akurat terkait implementasi

- Dana Perimbangan sekaligus merumuskan rekomendasi yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya.
- b. Peningkatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi dan kajian pelaksanaan Dana Perimbangan di daerah.
- Kerjasama dan peran serta Ditjen Perbendaharaan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masing-masing provinsi memiliki peran penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan. Kerjasama tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam pemantauan laporan realisasi dan penyusunan kajian implementasi Dana Perimbangan di daerah

Tabel 4 Strategi dan program dalam pengelolaan Dana Perimbangan

No	Strategi	Program	Waktu Pelaksanaan		Unit Kerja
			2018	2019	
1	Peningkatan kualitas Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan formula DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal</li> <li>• Menyempurnakan formula DAU untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal</li> <li>• Menyempurnakan formula DAK untuk mendorong pencapaian pelayanan dasar di daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> </ul>
2	Penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi UU No 33 Tahun 2004 untuk penyempurnaan hubungan keuangan pusat dan daerah</li> <li>• Pendampingan dari Pemerintah Pusat dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> </ul>
3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah pusat, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan <i>Focuss Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas implementasi pengelolaan Dana Perimbangan</li> <li>• Membentuk forum komunikasi antar para perencana dan pengelola Dana Perimbangan baik pusat maupun daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> <li>• Bappenas</li> <li>• K/L teknis</li> </ul>
4	Peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan alokasi Dana Perimbangan secara tepat dan cermat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas fiskal daerah</li> <li>• Menyelaraskan rencana kegiatan Dana Perimbangan khususnya DAK dengan prioritas nasional</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> <li>• DJA</li> <li>• Bappenas</li> <li>• K/L teknis</li> </ul>
5	Peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerjasama pelaksanaan pelatihan pengelolaan Dana Perimbangan melalui <i>cost sharing</i> APBN dan APBD.</li> <li>• Mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM secara mandiri di daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> </ul>



No	Strategi	Program	Waktu Pelaksanaan		Unit Kerja
			2018	2019	
6	Peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Transfer Umum (DAU + DBH) minimal 25% untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik.</li> <li>• Singkronisasi kegiatan DAK Fisik dengan belanja Kementerian/Lembaga dan pendanaan APBD.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> </ul>
7	Implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dengan Informasi Keuangan Pusat (IKP) dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)</li> <li>• Bimbingan teknis kepada para aplikator atau pengelola data keuangan daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> <li>• DJPB</li> </ul>
8	Peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik</li> <li>• Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan kajian pelaksanaan Dana Perimbangan di daerah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DJPK</li> <li>• DJPB</li> </ul>

## SIMPULAN

Secara umum, pengelolaan Dana Perimbangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, pengelolaan dana tersebut belum mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara optimal, terutama bagi wilayah kabupaten dan kota. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa kendala teknis dalam implementasi pengelolaan Dana Perimbangan. Kendala tersebut antara lain akurasi database perhitungan Dana Perimbangan, dan formula perhitungan Dana Perimbangan yang perlu penyempurnaan.

Hasil analisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif, sedangkan DBH memiliki pengaruh negatif.

Strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan berdasarkan analisis

SWOT yaitu: (1) peningkatan kualitas Dana Perimbangan, (2) penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (3) peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah pusat, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (4) peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah, (5) peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah, (6) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (7) implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, (8) peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Barro RJ. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *The Journal of Political Economy*.98(5):S103-S125.
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan 2012*. Jakarta (ID): DJPK.
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Pengelolaan DAK: Kondisi dan Strategi Ke Depan*. Jakarta (ID): DJPK
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah 2014*. Jakarta (ID): DJPK
- [DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. *Kajian Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah*. Jakarta (ID): DJPK
- Firdaus M. 2011. *Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor (ID): IPB Press.
- Husna A, Sofia M. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Penegmbangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *JEMI*. 4(2):1-12.
- Iimi A.2005. Decentralization and Economic Growth Revisited: an Empirical Note. *Journal of Urban Economics*.57:449-461.
- Im T.2010. Does Decentralization Reform Always Increase Economic Growth?: A Cross Country Comparison on the Performance. *International Journal of Public Administration*.33:508-520.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta (ID): Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez J, McNab RM. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*.31(9):1597-1616.
- Maryati U, Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. 5(2):68-84.
- Prasetyo RB, Firdaus M. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesai. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2(2):222-236.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung (ID): CV Alfabeta.
- Tiebout CM. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*.64(5):416-424.
- Tuasikal A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*.1(2):142-155.
- [UU]Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- Word Bank. 2010. *Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah: Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal*. Jakarta (ID): Word Bank.
- Xie D, Zou Hf, Davoodi H. 1999. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Jurnal of Urban Economics*.45:228-239.
- Zhang T, Zou Hf. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Jurnal of Public Economics*.67:221-240.

